

DAFTAR PUSTAKA

- Afrindo, Satria. (2022). Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kota Palembang Dalam Pemilu Tahun 2019.
- Anggraini. (2024). Metode Penelitian. Diakses pada 28 Oktober 2024.
<https://repo.inin-tulungung.ac.id>
- Anugrah, Eka Fifty .Diwawancarai oleh penulis. Maret 2025. Kabupaten Blitar.
- Ari, Sandy. (2025). Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 (Studi Kasus Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024). Jurnal Hukum Perdata dan Pidana 2(2).
- Berita Monitor Indonesia. (2024). KPU Kabupaten Blitar menjatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis pada lima anggota PPK atas pelanggaran kode etik dalam kegiatan istighosah 6 September 2024.
- DKPP. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1338. Jakarta: Sekretariat Negara.
- DKPP. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No.1404. Jakarta: Sekretariat Negara.

DKPP. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2021 No.188. Jakarta: Sekretariat Negara.

Fachrudin, Achmad. (2022). Oligarki Demokrasi dan Konglomerasi Media Massa. Literasindo.

Fani Lestari, Anggre. (2024). Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu Dalam Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar. Thesis. Universitas Andalas.

Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182. Jakarta: Sekretariat Negara.

Informasi Pilkada Tahun 2024. Diakses pada 6 Juli 2025.

https://ppid.kuduskab.go.id/page/informasi_pilkada_tahun_2024

Ishad, (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi. Alfabeta.

Jatimtimes. (2024). Bawaslu Kabupaten Blitar menilai lambannya respons KPU terhadap dugaan pelanggaran kode etik sebagai kelemahan dalam penegakan hukum etik Pilkada.

Julian, Rangga. (2021). Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung. *Khazanah Hukum*, 3(3).

K. Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.

KPU. Keputusan KPU Nomor 337 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/ Janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Jakarta: Sekretariat Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

KPU. Surat Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 1357 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pelanggaran Etik Anggota PPK Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024.

M, Agus. (2024). Melanggar Aturan KPU Beri Sanksi Lima PPK Viral Bersama Bapaslon Blitar. Diakses pada 13 Juli 2025.

<https://blitarkawentar.jawapos.com/politik/2275184242/melanggar-aturan-kpu-beri-sanksi-lima-ppk-viral-bersama-bapaslon-blitar>

Mahfud, Zaenudin. Diwawancarai oleh penulis. Maret 2025. Kabupaten Blitar.

Marzuki Mahmud, Peter. (2014). Penelitian Hukum. Prenada Media Grub.

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. (2014). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru. Universitas Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Baktihal.

Nabila, Zalza. (2025). Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2024 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Putusan Nomor 32-PKE-DKPP-II-2024). Thesis. UIN Imam Bonjol, Padang.

Poernomo, Bambang. (2002). Dalam Asas-asas Hukum Pidana. *Ghalia Indonesia*. 40.

Putri, Lailatul. Diwawancarai oleh penulis. Juli 2025. Kabupaten Blitar.

Rofiq, Ainur. Bawaslu Blitar Soroti Lambannya KPU Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Kode Etik PPK. Diakses pada 4 Desember 2024. <https://jatimtimes.com/baca/322602/20241011/085300/bawaslu-blitar-soroti-lambannya-kpu-tindak-lanjuti-dugaan-pelanggaran-kode-etik-ppk>

Rumbia, Dedi. (2024). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Hukum* 4(2).

Sistem pemeriksaan yang ada perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi. Diakses pada 15 Juli 2025. <https://kab-blitar.kpu.go.id/index.php/blog/read/rakor-penyelesaian-dan-penanganan-pelanggaran-administrasi-amp-amp-kode-etik-pemilihan-badan-adhoc-pilkada-2024>

Soekanto, Soerjono. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, *PT.Raja Grafindo Persada*.

Sumarni. (2023). Pelanggaran Kode Etik Anggota KPPS Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (Studi Pada TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto). Thesis, Universitas Andalas.

Teffany, Nathasia. (2025). Penegakan Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Oleh KPU Kota Surakarta. *Jurnal Bevingding* 3(1).

Yansen, Arnoldus. (2018). Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada KPUD Tapanuli Tengah). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Zikri, Alfi. (2023). Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI Di Kabupaten Brebes (Studi Atas Putusan DKPP No. 262 Tahun 2018). Skripsi. UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri,

Zubakhrum, M. (2020). *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*
Papas Sinar Sinanti.